

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

#### 2.1. Landasan Teori

##### 2.1.1 Biaya Utang (*cost of debt*)

Dalam membiayai operasi dan investasinya, suatu perusahaan tidak selalu memiliki dana yang cukup untuk merealisasikan rencananya tersebut. Perusahaan memang dapat memperoleh dana dari setoran modal pemilik. Jika setoran modal dari pemilik cukup untuk membiayai seluruh aktivitas perusahaan, maka perusahaan tidak membutuhkan tambahan dana dari luar. Akan tetapi dana yang berasal dari pemilik tidak selalu cukup untuk membiayai operasi dan investasi perusahaan sehingga dibutuhkan sumber dana selain dari pemilik perusahaan. Dalam memperoleh dana yang cukup besar perusahaan akan membutuhkan biaya yang cukup besar juga untuk membiayai semua pembiayaan perusahaan, sehingga akan menimbulkan biaya utang perusahaan.

Biaya utang (*cost of debt*) adalah biaya yang harus dikeluarkan perusahaan karena menggunakan utang, yang akan menghasilkan beban bunga setelah pajak atas berbagai bentuk uang [25]. Besaran efektif yang harus dibayar perusahaan atas utang berjalan; dapat diukur sebelum pajak atau sesudah pajak; meski begitu, karena biaya bunga bisa dikurangi, biaya setelah pajak lebih sering digunakan. Ini merupakan bagian struktur modal perusahaan, juga meliputi biaya ekuitas. Perusahaan menggunakan obligasi, pinjaman, dan berbagai bentuk utang untuk modal; ukuran biaya utang sangat berguna karena mengindikasikan suku bunga secara umum pada pembiayaan utang. Juga, memberikan ide kepada investor seberapa besar risiko perusahaan; perusahaan dengan risiko yang lebih tinggi biasanya menggunakan *cost of debt* lebih tinggi pula [1].

Dalam memperoleh dana untuk kepentingan pembiayaan, perusahaan pada umumnya memiliki beberapa sumber alternatif. Keputusan dalam memilih alternatif sumber pembiayaan tersebut sangatlah dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya adalah : (a) kemudahan dalam mendapatkan dana, (b) jumlah dana yang dibutuhkan, (c) jangka waktu pengembalian dana, (d) kemampuan perusahaan dalam membayar

beban pinjaman, (e) pertimbangan pajak, (f) masalah kendali perusahaan, dan (g) pengaruhnya terhadap laba per lembar saham. Secara garis besar, sumber pembiayaan perusahaan dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu pembiayaan utang dan pembiayaan ekuitas.

Yang dimaksud dalam pembiayaan utang (*debt financing*) adalah pembiayaan yang dilakukan dengan cara menerbitkan surat utang, seperti wesel atau pun obligasi. Dalam hal ini, kebutuhan dana perusahaan diperoleh dengan cara melakukan pinjaman atau berutang kepada kreditur. Masing-masing jenis pembiayaan memiliki kelebihan maupun kekurangan. Sebagai contoh, penggunaan modal sendiri sebagai sumber pembiayaan perusahaan memiliki beberapa kelebihan, di antaranya adalah kemudahan dalam mendapatkan dana, tidak dibatasi oleh berbagai aturan (ketentuan) atau persyaratan, waktu pengembalian dana yang tidak terbatas, dan tidak ada beban untuk membayar angsuran, bunga. Adapun biaya lainnya. Sedangkan kekurangannya adalah terletak pada jumlahnya yang terbatas (karena hanya mengandalkan pada modal pribadi pemilik), terutama apabila yang dibutuhkan cukup besar.

Di sisi lain, jika perusahaan memilih pinjaman sebagai alternatif sumber pembiayaan, kelebihannya adalah terletak pada kemungkinan untuk memperoleh dana dalam jumlah yang relatif besar. Sedangkan kekurangannya terletak pada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi dan memerlukan pembayaran angsuran, bunga, maupun biaya lainnya (biaya administrasi, provisi dan komisi). Beban bunga yang dibayarkan dapat dikurangkan untuk tujuan pajak (dengan kata lain, beban bunga akan mengurangi laba, yang pada akhirnya memperkecil pajak atas laba perusahaan), sedangkan dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham tidak dapat dikurangkan untuk tujuan pajak (ingat bahwa dividen bukanlah merupakan komponen penentu besarnya laba rugi perusahaan) [2].

Biaya utang merupakan komponen dari biaya modal. Biaya utang (*cost of debt*) terdiri dari 2 macam yaitu biaya utang bank (jangka panjang) dan biaya utang obligasi. Pemberi pinjaman dapat bereaksi terhadap kemungkinan biaya agensi melalui proteksi harga. Namun secara umum lebih hemat biaya bagi manajemen dengan menawarkan jaminan bahwa manajemen tidak akan melakukan aktivitas-

aktivitas yang tergolong pengalihan kekayaan kepada pemegang saham sehingga dapat dilihat bahwa pemegang saham berkepentingan untuk menawarkan perlindungan terhadap biaya agensi utang dalam upaya menekan bunga pinjaman. Mengeluarkan utang dengan peringkat lebih tinggi, yakni manajemen dapat mengeluarkan utang baru dengan prioritas lebih tinggi (terhadap pembayar bunga, pokok dan klaim terhadap aset perusahaan) dibandingkan dengan perhitungannya saat memberikan pinjaman pada perusahaan dan berpotensi untuk tidak memperoleh keuntungan dari pinjamannya. Biaya utang menjadi lebih tinggi saat perusahaan mendekati tidak mampu membayar (*default*) terhadap utangnya. Rumus yang digunakan untuk menghitung biaya utang adalah sebagai berikut [26]:

$$\text{Biaya Utang} = \frac{\text{Beban Bunga}}{\text{Rata-Rata Total Utang}} \quad (2.1)$$

### 2.1.2 Penghindaran Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pajak terdiri dari beberapa unsur yaitu:

- a) Iuran dari rakyat kepada Negara dan yang berhak memungut pajak hanyalah Negara yang berupa uang iuran (bukan barang).
- b) Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan bahwa pajak dipungut berdasarkan dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan kontraprestasi individual oleh pemerintah
- d) Pajak digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Di dalam negara pajak digunakan sebagai anggaran (*Budgetair*) dan mengatur (*Regulerend*) sistem pemerintahan. Anggaran digunakan sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran biaya Negara, sedangkan untuk mengatur digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi [27].

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No.

169/PMK.010/2015 untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan yang ditetapkan besarnya perbandingan antara hutang dan modal bagi wajib pajak badan yang didirikan di Indonesia. Adanya pengurang pajak penghasilan badan yang terutang yaitu PPh 22, PPh 23, PPh 24, PPh 25. Pajak penghasilan adalah salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari pendapatan rakyat, yang merupakan wujud kewajiban kenegaraan dan peran serta rakyat dalam pembiayaan dan pembangunan nasional. Undang-Undang pajak penghasilan mengatur pengenaan pajak yang pada dasarnya menyangkut Subjek Pajak (siapa yang dikenakan), Objek Pajak (penyebab pengenaan) dan Tarif Pajak (cara menghitung jumlah pajak) dengan pengenaan yang merata serta pembebanan yang adil [28].

Dalam menghitung PPh Badan diperlukan minimal tujuh komponen yang sangat penting yaitu [29]:

1. Penghasilan yang menjadi objek pajak  
Berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh No 36 tahun 2008 yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yang dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.
2. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Pengecualian ini diatur dalam pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh No 36 tahun 2008.
3. Penghasilan yang pajaknya dikenakan secara final yaitu penghasilan yang pajaknya telah final atau selesai sesuai dengan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh No 36 tahun 2008.
4. Biaya yang boleh dikurangi dari penghasilan bruto sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang PPh No 36 tahun 2008.
5. Biaya yang tidak boleh dikurangi dari penghasilan bruto sesuai dengan pasal 9 Undang- Undang PPh No 36 tahun 2008.
6. Biaya yang boleh dibiayakan sebesar 50% berdasarkan keputusan Dirjen Pajak No KEP- 220/PJ/2002 tanggal 18 April 2002 tentang pemakaian telepon seluler dan kendaraan perusahaan.
7. Biaya menggunakan daftar nominatif sesuai dengan surat edaran Dirjen Pajak No SE- 27/PJ.22/1986.

Setiap perusahaan senantiasa berusaha menghindari beban pajak dalam berbagai bentuk dan manivestasinya, karena pajak adalah pungutan yang diwajibkan oleh undang-undang, bukan kontribusi yang sifatnya sukarela (*taxes are enforced extractions, not voluntary contributions*), dan tanpa ada imbalan langsung dari pemerintah. Namun salah satu upaya dilakukan perusahaan adalah dengan meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan, yaitu dengan melakukan tindakan penghindaran pajak pada perusahaan. Penghindaran pajak adalah upaya meminimalkan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak, dan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak. Peraturan perpajakan menyatakan bahwa penghindaran pajak merupakan tindakan secara legal dan aman bagi wajib pajak, karena tidak bertentangan terhadap ketentuan perpajakan [30].

Metode dan teknik yang digunakan dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat pada undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri. Penghindaran pajak juga termasuk ke dalam praktik penggelapan pajak yang tertuju pada rekayasa *tax affairs* yang masih dalam bingkai ketentuan perpajakan. Penghindaran pajak bermanfaat bagi kreditur karena menghemat uang yang dapat digunakan untuk layanan utang. Tindakan ini dilakukan oleh perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan, yang harus memutuskan apakah akan menggunakan pendanaan dari kreditur untuk membayar beban pajak, atau untuk membayar bunga atas biaya utangnya. Perusahaan yang memiliki biaya utang yang tinggi akan menyebabkan pengurangan beban pajak yang akan dibayar oleh perusahaan. Beban bunga atas biaya utang perusahaan akan dibebankan ke dalam penghasilan perusahaan. Ketika penghasilan perusahaan berkurang maka dapat membantu perusahaan dalam meminimalkan beban pajak yang harus dibayar. Perusahaan sering sekali tidak melakukan perencanaan pajak di masa yang akan datang, melainkan ingin menghindari pembayaran pajak yang seharusnya menjadikan kewajiban setiap perusahaan [30].

Secara sederhana perusahaan melakukan penghindaran pajak sebagai usaha untuk mengoptimalkan laba setelah pajak dengan cara legal dengan memanfaatkan kelemahan peraturan yang ada salah satunya dengan meminimalisasi beban pajak. Penghindaran pajak banyak dilakukan untuk memperoleh keuntungan, dengan

menggunakan pengaturan transaksi sesuai pajak yang memberikan dampak pada manfaat atau pengurangan pajak. Kegiatan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dapat memberikan dampak yang buruk, di mana bunga jangka pendek berhubungan dengan tingkat penghindaran pajak dan penjualan jangka pendek membatasi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan [31].

Dalam penelitian ini penghindaran pajak diukur dengan menggunakan rasio *Effective Tax Rate* (ETR) yang merupakan rasio pajak yang dibayarkan untuk keuntungan sebelum pajak suatu periode tertentu, sehingga dengan *Effective Tax Rate* (ETR) maka manajer akan mengetahui efektivitas perencanaan pajak suatu perusahaan. Apabila perusahaan memiliki persentase ETR yang lebih tinggi dari tarif yang ditetapkan maka perusahaan kurang optimal dalam memaksimalkan insentif perpajakan yang ada. Semakin perusahaan memanfaatkan insentif perpajakan yang ada maka persentase ETR akan semakin rendah atau dengan kata lain akan semakin memperkecil persentase pembayaran pajak dari laba. Tarif pajak terjadi karena terdapat pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Penggunaan tarif ini merupakan salah satu alasan untuk tidak menggunakan *multiple rate*. Misalnya, tarif pajak efektif yang berlaku di Indonesia ditetapkan:

1. Untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih;
2. Untuk penyerahan jasa biro pelayanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih;

Untuk penyerahan jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (*freight charges*) adalah 10 % dari jumlah yang ditagih atau yang seharusnya yang ditagih [32]. Rumus yang digunakan untuk menghitung penghindaran pajak adalah sebagai berikut [29]:

$$\text{Effective Tax Rate (ETR)} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \quad (2.2)$$

### 2.1.3 Profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya, yaitu yang berasal dari kegiatan penjualan, penggunaan aset,

maupun penggunaan dana. Rasio yang mengukur profitabilitas antara lain hasil pengembalian atas aset. ROA (*Return on Asset*) merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Rasio profitabilitas dapat dianggap sebagai kombinasi dari banyak rasio lain yang lebih spesifik untuk menunjukkan gambaran yang lebih lengkap tentang kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba [33].

Penggunaan rasio profitabilitas disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan rasio profitabilitas secara keseluruhan atau hanya sebagian saja dari jenis rasio profitabilitas yang ada. Penggunaan rasio secara sebagian berarti bahwa perusahaan hanya menggunakan beberapa jenis rasio saja yang memang dianggap perlu untuk diketahui. Salah satu pengukuran profitabilitas yaitu dengan menggunakan *Return On Asset* (ROA) [34].

Manajemen dituntut untuk meningkatkan imbalan hasil (*return*) bagi pemilik perusahaan dan para investor, sekaligus meningkatkan keuntungan dalam aktivitas operasionalnya. Profitabilitas diproksikan dengan *Return On Asset* (ROA) yang merupakan tingkat pengembalian atau laba yang dihasilkan dari pengelolaan aset. Rasio ini biasa digunakan untuk membandingkan antara laba bersih dengan keseluruhan total aset pada perusahaan. ROA dapat dijadikan sebagai salah satu indikator dalam pengambilan keputusan oleh kreditur dalam memilih perusahaan untuk berinvestasi. Dengan demikian, semakin tinggi ROA maka semakin tinggi tingkat kepercayaan kreditur untuk menambah pendanaan dalam suatu perusahaan.

Rasio profitabilitas memiliki tujuan dan manfaat yang tidak hanya bagi pemilik perusahaan ataupun manajemen perusahaan, tetapi juga bagi pihak yang ada di luar perusahaan, terutama bagi pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Berikut adalah tujuan dan manfaat rasio profitabilitas secara keseluruhan [35]:

- a. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu;
- b. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang;
- c. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu;
- d. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari

- setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset;
- e. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan di hasilkan dari setiaperupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas;
  - f. Untuk mengukur margin laba kotor atas penjualan bersih;
  - g. Untuk mengukur margin laba operasional atas penjualan bersih;
  - h. Untuk mengukur margin laba bersih atas penjualan bersih.

Rasio profitabilitas mengukur tingkat pengembalian dari bisnis atas seluruh aset yang ada. Rasio profitabilitas yang diukur dengan *Return on Asset* (ROA) menggambarkan efisiensi pada dana yang digunakan dalam perusahaan. Semakin tinggi ROA maka perusahaan mampu menggunakan aset dengan baik untuk memperoleh keuntungan [36]. *Return on Asset* (ROA) dapat dirumuskan sebagai berikut [36]:

$$\text{Return on Asset (ROA)} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \quad (2.3)$$

#### 2.1.4 Leverage

*Leverage* adalah penggunaan aset dan sumber dana yang bersumber dari penggunaan biaya tetap (*fixed cost*), baik biaya tetap dari aktivitas operasi maupun biaya tetap aktivitas keuangan yang sanggup menghasilkan (mengungkit) laba yang lebih besar. *Leverage* berasal dari Sumber dana perusahaan yang dapat dibedakan menjadi dua yaitu sumber dana internal dan sumber dana ekstern. Sumber dana intern berasal dari laba yang ditahan, pemilik perusahaan yang tercermin pada lembar saham atau presentasi kepemilikan yang tertuang dalam neraca. Sedangkan sumber dana eksternal merupakan sumber dana perusahaan yang berasal dari luar perusahaan misalnya utang.

Dengan kata lain, *leverage* merupakan rasio yang berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih besar saat tingkat operasi sudah relatif tinggi, sehingga perusahaan cenderung untuk mengurangi tingkat *leverage* keuangan (mengurangi proporsi utangnya). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat *leverage* berhubungan dengan biaya utang-komposisi, proporsi utang dan ekuitas yang ditetapkan perusahaan untuk mendanainya. Rasio *leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya baik jangka panjang maupun jangka pendek.

*Leverage* digunakan untuk menjelaskan kemampuan perusahaan dalam

menggunakan aset dan sumber dana untuk memperbesar hasil pengembalian kepada pemiliknya. Perusahaan dengan *leverage* yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan lebih banyak menggunakan utang dalam menjalankan operasional perusahaannya. Secara umum, ada dua konsep *leverage* berdasarkan sumbernya yaitu [2]:

### 1. *Leverage* Operasi

*Leverage* operasi adalah rasio yang menunjukkan apabila ada dua perusahaan dan salah satu perusahaan memiliki *Leverage* operasi yang lebih besar dari pada perusahaan yang satu lagi, yang dicirikan dengan biaya tetap operasi lebih tinggi dan biaya variabel per unit lebih rendah. Namun, tingkat penjualan kedua perusahaan sama sehingga menunjukkan bahwa kondisi ekonomi yang diasumsikan sama untuk kedua perusahaan hal ini hanya untuk menegaskan kedua perusahaan hanya berbeda dalam *Leverage* operasi.

### 2. *Leverage* Keuangan

*Leverage* keuangan adalah rasio rasio yang menunjukkan apabila ada dua perusahaan dan salah satu perusahaan sama sekali tidak memiliki utang (*unlevered firm*), sedangkan perusahaan yang satu lagi memiliki sejumlah utang (*levered firm*) dengan perbandingan 50% utang, 50 % saham biasa. Hal ini menunjukkan tingkat laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) sama mengindikasikan bahwa tingkat *Leverage* operasi yang diasumsikan sama untuk kedua perusahaan.

Analisis *leverage* merupakan salah satu yang memanfaatkan perilaku biaya untuk pengambilan keputusan operasional dan keuangan. Laba perusahaan juga dapat dinilai dari besarnya *leverage* yang dimiliki perusahaan karena dapat mengungkit naik-turun laba perusahaan yang dikaitkan dengan volume penjualan yang didapatkan oleh perusahaan [37]. Perusahaan yang mampu menghasilkan laba melebihi biaya-biaya operasional mempunyai peluang besar untuk meningkatkan keuntungan setiap periode. Perusahaan yang menggunakan sumber dana dengan beban tetap dapat dikatakan perusahaan yang mempunyai *leverage* keuangan (*financial leverage*) dan diharapkan akan terjadi perubahan laba perusahaan.

Pendanaan perusahaan dengan meningkatkan *leverage* akan memotivasi pihak manajemen untuk memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kreditur, dan terlebih

pada pihak ketiga yang meminjamkan dananya kepada perusahaan. Peningkatan *leverage* dapat dilihat dari rasio utang yang menyebabkan jumlah porsi saham yang akan dijual oleh perusahaan berkurang. Meningkatnya jumlah *leverage* dapat mengendalikan penggunaan aliran kas bebas yang berlebihan oleh pihak manajemen perusahaan. Rasio *leverage* juga memberikan banyak manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Rasio *Debt to Asset Ratio* (DAR) disebut juga dengan *Debt Ratio* (Rasio Utang) merupakan perbandingan antara total utang dan total aset. Para kreditur menginginkan rasio utang (*debt ratio*) yang rendah karena semakin besar pembelian aset menggunakan utang maka semakin besar risiko para kreditur sebagai orang atau perusahaan yang memberikan pinjaman [38]. Adapun rumus untuk menghitung *leverage* adalah [38]:

$$\text{Debt to Asset Ratio (DAR)} = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Aset}} \quad (2.4)$$

### 2.1.5 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah gambaran dari besar kecilnya aset suatu perusahaan. Pada dasarnya ukuran perusahaan terbagi dalam 3 kategori yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium firm*), dan perusahaan kecil (*small firm*). Ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi nilai perusahaan karena semakin besar atau skala perusahaan maka akan semakin mudah bagi perusahaan dalam memperoleh sumber pendanaan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Besar kecilnya perusahaan akan mempengaruhi kemampuan dalam menanggung risiko yang mungkin timbul dari berbagai situasi yang dihadapi perusahaan. Perusahaan besar memiliki risiko yang lebih rendah dari pada perusahaan kecil. Hal ini dikarenakan perusahaan besar memiliki kontrol yang lebih baik (*grater control*) terhadap kondisi pasar sehingga mereka mampu menghadapi persaingan ekonomi.

Ukuran perusahaan sering dijadikan indikator untuk memperkirakan kemungkinan terjadinya kebangkrutan suatu perusahaan, di mana perusahaan dengan ukuran lebih besar dipandang mampu menghadapi krisis dalam menjalankan usaha. Ukuran perusahaan merupakan total aset untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun kemudian. Salah satu tolak ukur yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan adalah ukuran perusahaan tersebut [39]. Ukuran perusahaan

menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dinyatakan dengan total aset di mana semakin meningkat total aset maka semakin meningkat pula ukuran perusahaan suatu perusahaan. Semakin besar aset maka semakin besar modal yang ditanam, sementara semakin banyak penjualan maka semakin banyak juga perputaran uang dalam perusahaan. Semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka kecenderungan menggunakan biaya sendiri juga semakin besar. Hal ini disebabkan karena perusahaan besar membutuhkan biaya yang besar pula untuk menunjang operasionalnya, dan salah satu alternatif pemenuhannya adalah dengan menggunakan biaya perusahaan itu sendiri.

Ukuran perusahaan menentukan kekuatan tawar-menawar (*bargaining power*) dalam kontrak keuangan dalam suatu perusahaan. Perusahaan yang besar cenderung memilih pendanaan dari berbagai bentuk biaya utang, termasuk penawaran spesial yang lebih menguntungkan dibandingkan yang ditawarkan oleh perusahaan kecil. Semakin besar jumlah biaya utang yang terlibat maka semakin kemungkinan pembuatan kontrak keuangan yang dirancang sesuai dengan preferensi kedua pihak sebagai ganti dari penggunaan kontrak standar biaya utang [40]. Laba, aset dan tenaga kerja digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan yang berkorelasi tinggi, dalam setiap aktivitas suatu perusahaan untuk menilai risiko yang dimiliki perusahaan dalam meningkatkan tingkat aset yang akan dicapai. Hal ini dilakukan untuk menambah sumber pendanaan yang dimiliki perusahaan yang berasal dari biaya utang untuk mengembangkan kinerja dan operasional perusahaan. Kinerja perusahaan yang baik dan dapat dipercaya dilihat dari risiko yang dimiliki perusahaan yang lebih besar cenderung dinilai rendah, karena perusahaan dianggap telah menunjukkan kinerjanya. Dengan risiko yang dinilai lebih rendah, kreditur kemudian menetapkan biaya utang yang lebih rendah. Ketika total aset perusahaan besar maka skala ukuran perusahaan akan baik bagi perusahaan dan kreditur, pinjaman dana yang akan diberikan kreditur dilihat dari besarnya ukuran perusahaan.

Dari uraian tersebut, maka ukuran perusahaan adalah sesuatu yang dapat mengukur atau menentukan nilai dari besar atau kecilnya perusahaan melalui total aset, total penjualan, jumlah karyawan perusahaannya dan lain-lain yang dimiliki sebuah perusahaan. Hal ini tentu saja, memberikan dorongan kepada perusahaan untuk tetap

meningkatkan kualitas perusahaan agar ukuran perusahaan tetap stabil tanpa harus mengalami naik turun. Semakin meningkat ukuran perusahaan akan membuat perusahaan memiliki kestabilan dalam kondisi keuangannya, sehingga akan lebih mudah dalam memperoleh pendanaan untuk melakukan aktivitas perusahaan. Pendanaan yang baik akan menjadi point penting dalam mencapai aktivitas dengan melihat biaya utang yang akan dikeluarkan setiap melakukan aktivitas perusahaan tersebut. Dinyatakan dalam rumus sebagai berikut [39]:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln} (\text{Total Aset}) \quad (2.5)$$

### 2.1.6 Komisaris Independen

Dewan komisaris memiliki tanggung jawab dan wewenang mensupervisi kebijakan dan tindakan direksi dan memberikan nasehat kepada direksi bila diperlukan. Setiap anggota komisaris harus orang yang berkarakter baik dan memiliki pengalaman yang relevan. Komposisi dewan komisaris harus sedemikian rupa untuk memungkinkan adanya pengambilan keputusan yang efektif dan cepat. Paling sedikit 30% dari seluruh anggota komisaris merupakan anggota dari luar agar meningkatkan efektivitas dan transparansi pertimbangannya [41]. Komisaris independen adalah komisaris yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan direksi atau pemegang saham. Dalam perspektif hukum ada tiga acuan yang menjadi landasan adanya komisaris independen, yaitu [22]:

1. Acuan tentang kedudukan komisaris dalam suatu perseroan terbatas seperti yang diatur dalam Pasal 108 sampai dengan Pasal 121 UUPM.
2. Ketentuan Pasal 80 UUPM yaitu tentang tanggung jawab atas informasi yang tidak benar dan menyesatkan di mana komisaris termasuk pihak yang diancam oleh Pasal tersebut.
3. Komisaris bertanggung jawab dan berwenang untuk mengawasi kebijakan dan tindakan direksi, dan memberikan nasehat kepada direksi jika diperlukan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan peraturan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik, pada pasal 20 yang mengatur tentang keanggotaan dewan komisaris sebagai berikut [21]:

- a. Dewan komisaris paling kurang terdiri dari dua orang anggota dewan komisaris;
- b. Dalam hal dewan komisaris terdiri dari dua orang anggota dewan komisaris, satu diantaranya adalah komisaris independen;
- c. Dalam hal dewan komisaris terdiri lebih dari dua orang anggota dewan komisaris, jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris;
- d. Satu di antara anggota dewan komisaris diangkat menjadi komisaris utama atau presiden komisaris.

Persyaratan menjadi komisaris independen pada perusahaan tercatat adalah sebagai berikut [41]:

- a. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali perusahaan tercatat;
- b. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan direktur dan/atau komisaris lainnya;
- c. Tidak bekerja rangkap sebagai direktur di perusahaan lainnya yang berafiliasi dengan perusahaan tercatat yang bersangkutan;
- d. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Komisaris independen dapat mengambil langkah-langkah pencegahan kecurangan atau usulan perbaikan sistem, tentu saja tetap dalam kerangka kerja sebagai komisaris. Melalui peran tersebut, komisaris independen telah berfungsi efektif dalam melindungi perusahaan publik dari risiko sekaligus melindunginya dari potensi tuntutan hukum karena kegagalan dalam melaksanakan kewajibannya [21]. Komisaris independen diukur dengan membandingkan jumlah komisaris independen terhadap jumlah anggota dewan komisaris. Independen bagi komisaris merupakan hal yang harus dalam satu perusahaan agar komisaris dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan efektif. Agar perusahaan menjadi efektif dalam melaksanakan tugasnya maka jumlah komisaris independen dalam perusahaan harus ditingkatkan. Setiap penambahan komisaris independen maka biaya utang akan menurun. Adanya komisaris independen sebagai monitor supervisor menyebabkan manajemen cenderung memberikan laporan keuangan yang kredibel, sehingga nasabah dan kreditur beranggapan bahwa perusahaan yang memiliki dewan komisaris independen yang baik memiliki kinerja yang unggul dan akan menurunkan risiko perusahaan

sehingga dapat menurunkan biaya utang. Jika kinerja perusahaan baik maka keuntungan perusahaan meningkat, dengan meningkatnya keuntungan perusahaan maka perusahaan dapat memperkecil biaya utang [22]. Jadi, secara sistematis proporsi komisaris independen dapat dirumuskan sebagai berikut [21]:

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Anggota Dewan Komisaris}} \quad (2.6)$$

### 2.1.7 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional adalah persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh badan hukum atau institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, reksadana, bank maupun perusahaan dan lembaga lain. Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap manajemen perusahaan, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen. Sehingga dengan adanya kontrol yang ketat, menyebabkan manajer menggunakan utang pada tingkat rendah untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya risiko kebangkrutan, karena semakin tinggi kepemilikan institusional pada suatu perusahaan maka akan semakin kuat kontrol eksternal terhadap perusahaan [24].

Semakin besar kepemilikan institusi keuangan maka akan semakin besar kekuatan dan dorongan dari institusi keuangan untuk mengawasi manajemen dan akibatnya akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan akan meningkat. Pengaruh investor institusional terhadap manajemen perusahaan memberi dampak yang paling penting untuk menyelaraskan kepentingan manajemen dan pemegang saham. Hal ini disebabkan, tingkat kepemilikan institusional tinggi dapat berdampak buruk terhadap perusahaan karena menimbulkan masalah pertahanan, yang berarti jika kepemilikan institusional tinggi, para manajer memiliki posisi yang kuat untuk melakukan suatu kontrol terhadap perusahaan dan pihak pemegang saham eksternal akan mengalami kesulitan untuk mengendalikan tindakan para manajer.

Kepemilikan institusional diukur dengan menggunakan rasio antara jumlah lembar saham yang dimiliki institusi terhadap jumlah lembar saham perusahaan yang beredar secara keseluruhan. Adanya kepemilikan saham oleh investor institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja

manajemen karena mereka memiliki kekuatan hak suara untuk mengadakan perubahan pada saat manajemen sudah dianggap tidak efektif lagi dalam mengelola perusahaan. Para investor institusional ini biasanya bertindak sebagai pihak yang memonitor jalannya sebuah perusahaan, dan dalam melakukan monitoring investor institusional ini lebih berpihak kepada para pemegang saham. Monitoring yang dilakukan oleh investor institusional tentunya akan menjamin kemakmuran pemegang saham, pengaruh kepemilikan institusional dalam sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang mencakup besar dalam pasar modal.

Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang optimal. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang akan diambil manajer. Hal ini karena investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba. Bisnis suatu perusahaan berjalan dengan baik akan dipengaruhi kepemilikan institusional yang berperan penting dalam mengawasi jalannya perusahaan. Peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham yang didukung oleh peran investor institusional, dianggap mampu untuk mengawasi dari setiap keputusan yang diambil oleh manajer perusahaan.

Perusahaan harus secara terus menerus memantau dan mengawasi hubungan antara manajer, pemegang saham dan investor institusional untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam memenuhi persentase kepemilikan saham yang akan mempengaruhi jumlah pendanaan yang dimiliki perusahaan. Investor institusional dengan pengawasan yang baik akan didukung oleh pihak institusional yang berperan penting dalam mengendalikan kepemilikan institusional perusahaan. Pengawasan dari pihak institusional yang tinggi maka risiko suatu perusahaan akan kecurangan pun berkurang dan dengan tingkat risiko yang lebih rendah maka biaya utang yang akan diterima perusahaan pun akan lebih rendah. Risiko suatu perusahaan sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya biaya utang yang didapat. Kepemilikan institusional diukur dengan menggunakan rasio antara jumlah lembar saham yang dimiliki institusi terhadap jumlah lembar saham perusahaan yang beredar secara

keseluruhan [42]. Rumus yang digunakan untuk menghitung kepemilikan institusional adalah sebagai berikut [42]:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah Saham Yang Dimiliki Institusi}}{\text{Total Saham Beredar}} \quad (2.7)$$

## 2.2 Review Penelitian Terdahulu

Ada beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal yaitu:

1. Salsabilla Tahaanii, Dudi Pratomo dan Kurnia (2019) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Tax Avoidance* Terhadap *Cost Of Debt*”. Penelitian dilakukan pada perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2015-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel *Book tax different*, *effective tax rate*, profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap Biaya Utang. Secara parsial variabel *Book tax different*, *effective tax rate*, profitabilitas, *leverage* berpengaruh terhadap Biaya Utang dan variabel Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Biaya Utang [20].
2. Angela Dirman (2020) melakukan penelitian dengan judul “Biaya Utang: Dampak Faktor Keuangan dan Faktor Nonfinansial”. Penelitian dilakukan pada perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2016-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel *Leverage* berpengaruh terhadap Biaya Utang. Secara parsial variabel Profitabilitas, Likuiditas, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Biaya Utang. *Leverage* berpengaruh terhadap Biaya Utang [13].
3. Baiq Fitri Arianti (2019) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pengungkapan Sukarela, Penghindaran Pajak Dan *Corporate Governance* Terhadap Biaya Uutang”. Penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur sektor barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2013-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel Pengungkapan Sukarela, Penghindaran Pajak dan *Corporate Governance* berpengaruh terhadap Biaya Utang. Secara parsial variabel Pengungkapan Sukarela tidak berpengaruh terhadap Biaya Utang. Penghindaran Pajak

berpengaruh terhadap Biaya Utang [10].

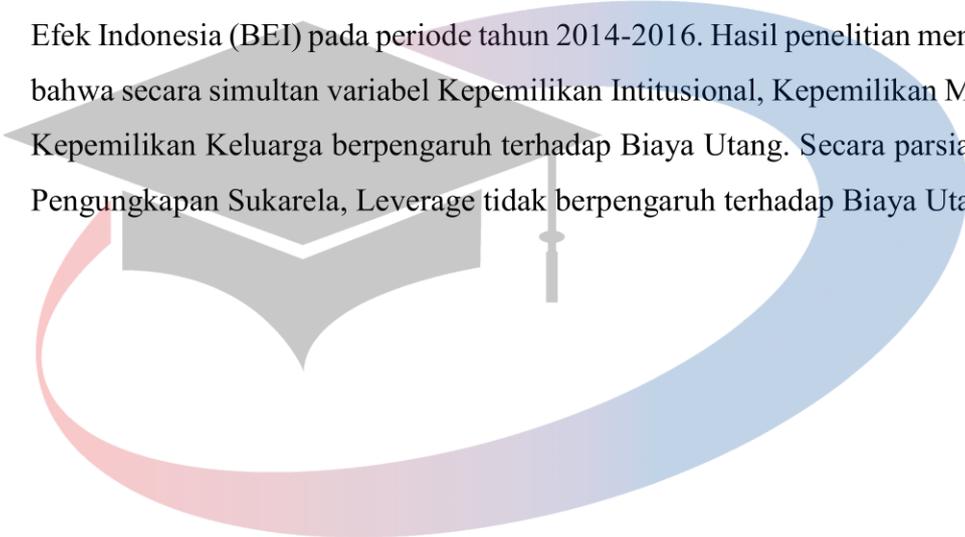
4. Dewi Kusuma Wardani dan Hestina Dwi Sari Rumahorbo (2018) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penghindaran Pajak, Tata Kelola Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Biaya Utang”. Penelitian dilakukan pada perusahaan sektor industri dan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2012- 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Biaya Utang. Secara parsial variabel Penghindaran Pajak, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Biaya Utang. Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Biaya Utang [17].
5. Dwi Ricky Nugroho dan Wahyu Meiranto (2015) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Biaya Ekuitas Dan Biaya Utang”. Penelitian dilakukan pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2012-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel Kualitas Audit dan Komisaris Independen berpengaruh terhadap Biaya Utang. Secara parsial variabel Kepemilikan Keluarga, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Frekuensi Pertemuan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Biaya Utang. Kualitas Audit berpengaruh terhadap Biaya Utang. Komisaris Independen berpengaruh terhadap Biaya Utang [18].
6. Elvis Nopriyanti Sherly dan Desi Fitria (2019) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penghindaran Pajak, Kepemilikan Institusional, Dan Profitabilitas Terhadap Biaya Utang”. Penelitian dilakukan pada perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2011-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel Penghindaran pajak dan Profitabilitas berpengaruh terhadap Biaya Utang. Secara parsial variabel Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap Biaya Utang. Penghindaran Pajak dan Profitabilitas berpengaruh terhadap Biaya Utang [12].
7. Fahreza Utama, Dwi Jaya Kirana dan Kornel Sitanggang (2019) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Biaya Utang Dan

Kepemilikan Institusional Sebagai Pemoderasi”. Penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode tahun 2015-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, *Leverage* berpengaruh terhadap Biaya Utang. Kepemilikan Institusional memoderasi Penghindaran Pajak dan Biaya Utang. Secara parsial Arus Kas Operasi tidak berpengaruh terhadap Biaya Utang. Penghindaran Pajak berpengaruh terhadap Biaya Utang. Kepemilikan Institusional memoderasi Penghindaran Pajak dan Biaya Utang [14].

8. H. F. Anto Manullang, Hendra Agustinus Marbun, Irene M Tarigan dan Binsar Sihombing (2020) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Tax Avoidance* Terhadap *Cost of Debt* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”. Penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015– 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel *Tax Avoidance*, *Size* dan *Return On Asset* berpengaruh terhadap biaya utang. Secara parsial variabel *Tax* [11].
9. Ibnu Reza Ashkhabi dan Linda Agustina (2015) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Corporate Governance*, Struktur Kepemilikan Perusahaan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Biaya Utang”. Penelitian dilakukan pada seluruh perusahaan yang terdaftar sebagai Peserta *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) periode tahun 2011-2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel *Corporate Governance Index*, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Biaya Utang. Secara parsial variabel Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap Biaya Utang. *Corporate Governance Index*, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Biaya Utang [19].
10. Nadia Yuli Widyastuti dan Dwi Cahyo Utomo (2020) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kualitas Audit, *Voluntary* Dan *Timely Disclosure* Terhadap Biaya Utang”. Penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2014-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel Pengungkapan Sukarela dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Biaya Utang. Secara parsial variabel Kualitas Audit, Ketepatan Waktu Pelaporan,

Kerugian Perusahaan dan Variabilitas Laba tidak berpengaruh terhadap Biaya Utang. Pengungkapan Sukarela berpengaruh terhadap Biaya Utang. Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Biaya Utang [16].

11. Pebrina Swissia dan Benri Purba (2018) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Struktur Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Keluarga, Pengungkapan Sukarela Dan Leverage Terhadap Biaya Utang”. Penelitian dilakukan pada perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2014-2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel Kepemilikan Intitusional, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Keluarga berpengaruh terhadap Biaya Utang. Secara parsial variabel Pengungkapan Sukarela, Leverage tidak berpengaruh terhadap Biaya Utang [15].



UNIVERSITAS  
MIKROSKIL

Tabel 2.1 Review Peneliti Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil yang Diperoleh
Salsabilla Tahaanii, Dudi Pratomo dan Kurnia (2019) [20].	Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Cost of Debt pada perusahaan Manufaktur Yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2015-2017.	<u>Variabel Dependen:</u> Biaya Utang <u>Variabel</u> <u>Independen:</u> a. <i>Tax Avoidance</i> b. <i>Effective Rate</i> c. Profitabilitas d. <i>Leverage</i> e. Ukuran Perusahaan.	<u>Secara Simultan:</u> <i>Book tax different, effective tax rate, profitabilitas, leverage,</i> dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap Biaya Utang <u>Secara Parsial:</u> <i>Book tax different, effective tax rate, profitabilitas, leverage</i> berpengaruh terhadap Biaya Utang. Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Biaya Utang.
Angela Dirman (2020) [13].	Biaya Utang: Dampak Faktor Keuangan dan Faktor Nonfinansial pada perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2016-2018.	<u>Variabel Dependen:</u> Biaya Utang <u>Variabel</u> <u>Independen:</u> a. <i>Leverage</i> b. Profitabilitas. c. Likuiditas d. Kepemilikan Manajerial e. Kepemilikan Institusional f. Komisaris Independen	<u>Secara Simultan:</u> <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap Biaya Utang. <u>Secara Parsial:</u> a. <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap Biaya. b. Profitabilitas, Likuiditas, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional. dan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Biaya Utang.
Baiq Fitri Arianti (2019) [10].	Pengaruh Pengungkapan Sukarela, Penghindaran Pajak Dan <i>Corporate Governance</i> Terhadap Biaya Utang pada perusahaan manufaktur sektor barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2013-2017.	<u>Variabel Dependen:</u> Biaya Utang. <u>Variabel</u> <u>Independen:</u> a. Pengungkapan Sukarela. b. Penghindaran Pajak. c. <i>Corporate Governance</i> .	<u>Secara Simultan:</u> Pengungkapan Sukarela, <i>Corporate Governance</i> dan Penghindaran Pajak berpengaruh terhadap Biaya Utang. <u>Secara Parsial:</u> a. Penghindaran Pajak berpengaruh terhadap Biaya Utang. b. Pengungkapan Sukarela tidak berpengaruh terhadap Biaya Utang.

Sambungan Tabel 2.1

Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil yang Diperoleh
Dewi Kusuma Wardani dan Hestina Dwi Sari Rumahorbo (2018) [17].	Pengaruh Penghindaran Pajak, Tata Kelola Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Biaya Utang pada perusahaan sektor industri dan sektor industri barang	<u>Variabel Dependen:</u> Biaya Utang. <u>Variabel Indenden:</u> a.Kepemilikan Manajerial. b.Komisaris Independen c.Penghindaran Pajak. d.Kepemilikan Institusional. e. Komite Audt. f.Ukuran Perusahaan	<u>Secara Simultan:</u> Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Biaya Utang. <u>Secara Parsial</u> a.Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Biaya Utang. b.Penghindaran Pajak, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Komite Audit dan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Biaya Utang.
Dwi Ricky Nugroho dan Wahyu Meiranto (2015) [18].	Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Biaya Ekuitas Dan Biaya Utang	<u>Variabel Dependen:</u> Biaya Ekuitas dan Biaya Utang <u>Variabel Indenden:</u> a. Kualitas Audit b. Komisaris Independen c. Kepemilikan Keluarga d. Kepemilikan Manajerial e. Kepemilikan Institusional. f.Frekuensi g.Pertemuan Komite Audit.	<u>Secara Simultan:</u> Kualitas Audit dan Komisaris Independen berpengaruh terhadap Biaya Utang. <u>Secara Parsial:</u> Kepemilikan Keluarga, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Frekuensi Pertemuan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Biaya Utang.
Elvis Nopriyanti Sherly dan Desi Fitria (2019) [12].	Pengaruh Penghindaran Pajak, Kepemilikan Institusional, Dan Profitabilitas Terhadap Biaya Utang pada perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2011-2015.	<u>Variabel Dependen:</u> Biaya Utang <u>Variabel Indenden:</u> a.Penghindaran Pajak. b.Profitabilitas c.Kepemilikan Institusional.	<u>Secara Simultan:</u> Penghindaran pajak dan Profitabilitas berpengaruh terhadap Biaya Utang. <u>Secara Parsial:</u> a.Penghindaran Pajak berpengaruh terhadap Biaya Utang. b.Profitabilitas berpengaruh terhadap Biaya Utang. c.Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap Biaya Utang.

Sambungan Tabel 2.1

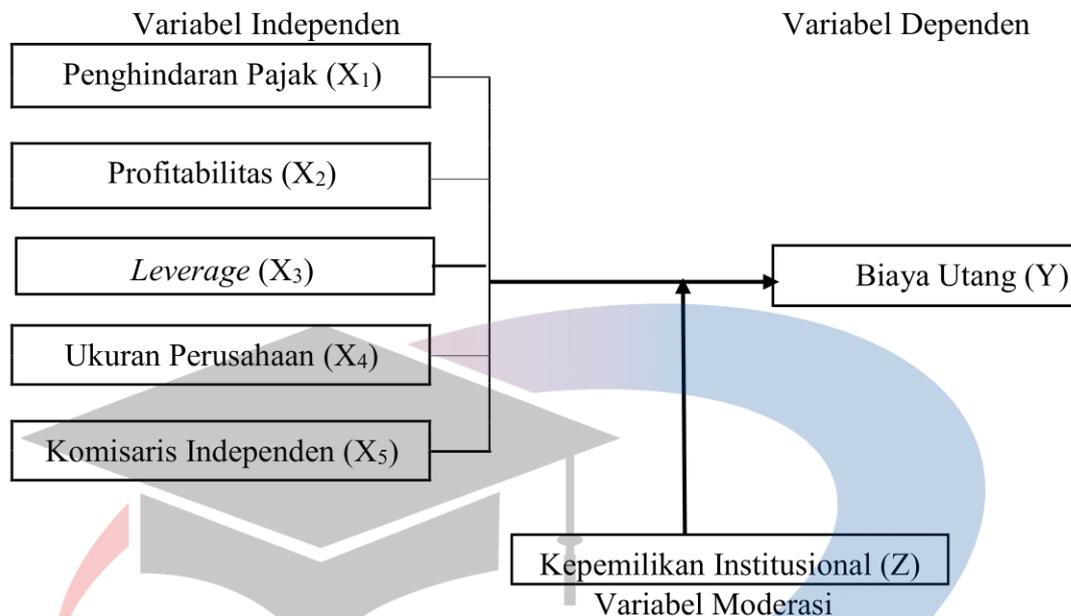
Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil yang Diperoleh
Fahreza Utama, Dwi Jaya Kirana dan Kornel Sitanggang (2019) [14]	Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Biaya Utang Dan Kepemilikan Institusional Sebagai Pemoderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode tahun 2015-2017.	<u>Variabel Dependen:</u> Biaya Utang <u>Variabel</u> <u>Independen:</u> a.Ukuran Perusahaan. b.Umur Perusahaan. c.Leverage. d.Arus Kas Operasi <u>Variabel Moderasi:</u> Kepemilikan Insitusal.	Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap Biaya Utang. <u>Secara Parsial:</u> a. Penghindaran Pajak berpengaruh terhadap Biaya Utang. b. Arus Kas Operasi tidak berpengaruh terhadap Biaya Utang. <u>Secara Simultan:</u> <u>Secara Moderasi:</u> <u>Kepemilikan</u> Institusional memoderasi Penghindaran Pajak dan Biaya Utang.
H. F. Anto Manullang, Hendra Agustinus Marbun, Irene M Tarigan dan Binsar Sihombing (2020) [11].	Pengaruh <i>Tax Avoidance</i> Terhadap <i>Cost of Debt</i> Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia	<u>Variabel Dependen:</u> <i>Cost of Debt</i> <u>Variabel</u> <u>Independen:</u> a. <i>Tax Avoidance</i> b. <i>Size</i> <i>Return On Asset</i>	<u>Secara Simultan:</u> <i>Tax Avoidance</i> , <i>Size</i> <i>Return On Asset</i> berpengaruh terhadap Biaya Utang. <u>Secara Parsial:</u> a. <i>Tax Avoidance</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Cost of Debt</i> . b. <i>Size</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Cost of Debt</i> . <i>Return On Asset</i> berpengaruh terhadap <i>Cost of Debt</i> .
Ibnu Reza Ashkhabi dan Linda Agustina (2015) [19].	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> , Struktur Kepemilikan Perusahaan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Biaya Utang	<u>Variabel Dependen:</u> Biaya Utang <u>Variabel</u> <u>Independen:</u> a. <i>Corporate Governance Index</i> b. Kepemilikan Institusional c. Ukuran Perusahaan d. Kepemilikan Manajerial	<u>Secara Simultan:</u> <i>Corporate Governance Index</i> , Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Biaya Utang. <u>Secara Parsial:</u> a. <i>Corporate Governance Index</i> , Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Biaya Utang b. Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap Biaya Utang.

Sambngan Tabel 2.1

Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil yang Diperoleh
Nadia Yuli Widyastuti dan Dwi Cahyo Utomo (2020) [16].	Pengaruh Kualitas Audit, <i>Voluntary Dan Timely Disclosure</i> Terhadap Biaya Utang pada perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2014-2018	<u>Variabel Dependen:</u> Biaya Utang <u>Variabel Indenpenden:</u> a.Pengungkapan Sukarela b.Ukuran Perusahaan c. Kualitas Audit d.Ketepatan Waktu Pelaporan e.Kerugian Perusahaan f. Variabilitas Laba	<u>Secara Simultan:</u> Pengungkapan Sukarela dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Biaya Utang.  <u>Secara Parsial:</u> a.Pengungkapan Sukarela berpengaruh terhadap Biaya Utang. b.Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Biaya Utang. c.Kualitas Audit, Ketepatan Waktu Pelaporan, Kerugian Perusahaan dan Variabilitas Laba tidak berpengaruh terhadap Biaya Utang.
Pebrina Swissia dan Benri Purba (2018) [15].	Pengaruh Struktur Kepemilikan Intitusional, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Keluarga, Pengungkapan Sukarela Dan <i>Leverage</i> Terhadap Biaya Utang pada perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2014-2016	<u>Variabel Dependen:</u> Biaya Utang <u>Variabel Indenpenden:</u> a.Kepemilikan Intitusional. b.Kepemilikan Manajerial. c.Kepemilikan Keluarga. d.Pengungkapan Sukarela. e. <i>Leverage</i> .	<u>Secara Simultan:</u> Kepemilikan Intitusional, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Keluarga berpengaruh terhadap Biaya Utang. <u>Secara Parsial:</u> Pengungkapan Sukarela dan <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap Biaya Utang.

### 2.3. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan model atau bentuk konseptual tentang bagaimana teori yang digunakan berkaitan dengan berbagai faktor-faktor yang telah peneliti uraikan sebagai masalah penting. Kerangka konsep yang dibuat dalam penelitian ini adalah:



**Gambar 2.1. Kerangka Konseptual**

Berdasarkan kerangka konseptual di atas, variabel dependen pada penelitian ini adalah Biaya Utang. Variabel independen pada penelitian ini adalah Penghindaran Pajak, Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan dan Komisaris Independen sedangkan variabel moderasi pada penelitian ini adalah Kepemilikan Institusional.

## 2.4 Pengembangan Hipotesis

### 2.4.1 Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Biaya Utang dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi

Perusahaan selalu mengupayakan tingkat laba yang tinggi, banyak beban yang dapat mengurangi tingkat laba salah satunya adalah pembayaran pajak. Salah satu upaya perusahaan untuk mengurangi beban pajak adalah dengan melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak sengaja dilakukan perusahaan bertujuan untuk mengurangi tingkat pembayaran pajak perusahaan. Dalam mengelola dan mengembangkan perusahaan yang dijalankan, perusahaan mempunyai dua sumber memperoleh pendanaan, salah satunya dari pinjaman kreditur. Pinjaman yang diberikan kreditur dianggap sebagai utang perusahaan, kreditur menuntut pengembalian dari perusahaan. Tingkat pengembalian yang diberikan perusahaan ini

yang akan menjadi biaya utang bagi perusahaan. Biaya utang adalah tingkat pengembalian yang diinginkan kreditur saat memberikan pendanaan kepada perusahaan. Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dipandang kreditur sebagai tindakan yang mengandung resiko, justru dapat meningkatkan biaya utang. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa penghindaran pajak berpengaruh terhadap biaya utang [10].

Adanya kepemilikan institusional sebagai kontrol yang lebih baik, kepemilikan institusional memiliki peran penting dalam mengawasi kinerja manajemen yang lebih optimal. Tingginya tingkat kepemilikan institusional, maka semakin besar tingkat pengawasan kepada manajemen sehingga mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dan kreditur. Investor institusional dapat mengurangi biaya utang dengan mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dan kreditur, sehingga mengurangi peluang terjadinya penghindaran pajak. Salah satu tujuan perusahaan melakukan penghindaran pajak untuk meningkatkan laba perusahaan. Bentuk dari meningkatnya kinerja perusahaan dilihat dari laba yang didapatkan perusahaan. Kepemilikan institusional dapat meningkatkan kinerja perusahaan sehingga kepemilikan institusional dapat memoderasi penghindaran pajak dan biaya utang. Penelitian terdahulu membuktikan kepemilikan institusional memoderasi penghindaran pajak dan biaya utang [14]. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis penelitian ini adalah:

H1a: Penghindaran Pajak berpengaruh Terhadap Biaya utang

H2a: Kepemilikan Institusional memoderasi Penghindaran Pajak dengan Biaya utang.

#### **2.4.2 Pengaruh Profitabilitas terhadap Biaya Utang dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi**

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba, profitabilitas diukur dengan menggunakan ROA (return on asset). ROA merupakan bentuk yang mencerminkan tingkat keberhasilan kinerja keuangan perusahaan. Perusahaan dengan tingkat profitabilitras yang tinggi umumnya menggunakan utang dalam jumlah yang relatif sedikit, karena penggunaan utang yang rendah menyebabkan biaya utang yang ditimbulkan juga menjadi rendah. Semakin tinggi nilai ROA maka semakin baik kinerja keuangan perusahaan karena menggambarkan

bagaimana aset perusahaan digunakan untuk memperoleh laba. Profitabilitas perusahaan yang semakin tinggi dapat mengurangi biaya utang. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap biaya utang [12].

Peran penting kepemilikan institusional dipercaya memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengawasi kinerja dari manajemen perusahaan. Peningkatan kepemilikan institusional dalam perusahaan dapat mengawasi manajemen menggunakan dana untuk biaya utang. ROA merupakan rasio yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan semakin baik, dengan adanya kepemilikan institusional dipercaya dapat meningkatkan kinerja perusahaan karena memiliki kemampuan pengawasan yang optimal terhadap manajemen. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan menggunakan utang dalam jumlah yang relatif sedikit sehingga menyebabkan biaya utang yang timbul juga menjadi rendah. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis penelitian ini adalah:

H1b: Profitabilitas berpengaruh terhadap Biaya Utang

H2b: Kepemilikan Institusional memoderasi Profitabilitas dengan Biaya Utang.

#### **2.4.3 Pengaruh *Leverage* terhadap Biaya Utang dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi**

*Leverage* dianggap sebagai penafsiran dari risiko gagal bayar terhadap biaya utang. Semakin tingginya rasio *Leverage* maka akan semakin tinggi pula risiko gagal bayar atas biaya utang yang dimiliki perusahaan, mengakibatkan kreditur tidak memberikan pendanaan yang besar kepada perusahaan. Semakin rendahnya rasio *Leverage* maka kreditur beranggapan bahwa gagal bayar terhadap utang kecil kemungkinan terjadi. Penelitian terdahulu membuktikan bahwa adanya pengaruh *Leverage* terhadap biaya utang [14].

Kepemilikan institusional dianggap sebagai pengawasan terhadap perusahaan dalam menjamin nilai-nilai perusahaan. Semakin baik pengawasan maka akan meningkatkan nilai perusahaan sehingga tingkat kepercayaan kreditur akan tinggi. Perusahaan dengan tingkat *Leverage* yang tinggi jika didukung dengan kepemilikan institusional yang tinggi maka akan menyebabkan biaya utang yang akan dibayarkan lebih rendah. Hal ini dikarenakan *Leverage* menimbulkan beban bunga yang dapat

dimanfaatkan sebagai pengurang laba perusahaan, sehingga kondisi tersebut dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan pembayaran biaya utang. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis penelitian ini adalah:

H1c: *Leverage* berpengaruh terhadap Biaya Utang.

H2c: Kepemilikan Institusional memoderasi *Leverage* dengan Biaya Utang.

#### **2.4.4 Pengaruh Ukuran perusahaan terhadap Biaya Utang dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi**

Besarnya asset yang dimiliki suatu perusahaan maka semakin tinggi kepercayaan dari kreditur untuk memberikan pinjaman atau utang kepada perusahaan. Perusahaan yang memiliki aset yang lebih tinggi memberikan jaminan kepada kreditur ketika biaya utang jatuh tempo. Semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka kecenderungan menggunakan biaya sendiri juga semakin besar. Hal ini disebabkan karena perusahaan besar membutuhkan biaya yang besar pula untuk menunjang operasionalnya, salah satu alternatif pemenuhannya adalah dengan menggunakan biaya perusahaan itu sendiri. Apabila perusahaan dengan ukuran perusahaan yang besar menghasilkan laba yang kecil akan memberi dampak negatif bagi para kreditur. Kreditur akan menilai bahwa manajemen perusahaan tidak mampu mengelola pendanaan yang telah diberikan kreditur kepada perusahaan. Penelitian terdahulu membuktikan bahwa adanya pengaruh ukuran perusahaan terhadap biaya utang [16].

Peran penting kepemilikan institusional dipercaya memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengawasi kinerja dari manajemen perusahaan. Kepemilikan Institusional tidak memiliki hubungan terhadap ukuran perusahaan, karena kepemilikan institusional hanyalah sebagai monitoring atau pengawasan terhadap kinerja manajemen perusahaan. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H1d: Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Biaya Utang

H2d: Kepemilikan Institusional tidak memoderasi Ukuran Perusahaan dengan Biaya Utang.

#### **2.4.5 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Biaya Utang dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi**

Adanya komisaris independen sebagai monitor supervisor menyebabkan manajemen cenderung memberikan laporan keuangan yang kredibel, sehingga nasabah dan kreditur beranggapan bahwa perusahaan yang memiliki dewan komisaris independen yang baik memiliki kinerja yang unggul dan akan menurunkan risiko perusahaan sehingga dapat menurunkan biaya utang. Jika kinerja perusahaan baik maka keuntungan perusahaan meningkat, dengan meningkatnya keuntungan perusahaan maka perusahaan dapat memperkecil biaya utang. Komisaris independen dapat mengambil langkah-langkah pencegahan kecurangan atau usulan perbaikan sistem, tentu saja tetap dalam kerangka kerja sebagai komisaris. Melalui peran tersebut, komisaris independen telah berfungsi efektif dalam melindungi perusahaan dari risiko sekaligus melindunginya dari potensi tuntutan hukum karena kegagalan dalam melaksanakan kewajibannya. Penelitian terdahulu membuktikan bahwa adanya pengaruh Komisaris Independen terhadap Biaya Utang [18].

Peran penting kepemilikan institusional dipercaya memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengawasi kinerja dari manajemen perusahaan. Kepemilikan institusional didukung oleh adanya komisaris independen dapat menyebabkan perusahaan dikontrol ketat dalam setiap keputusan dan informasi mengenai laporan keuangan perusahaan. Adanya kontrol yang ketat dari kepemilikan institusional dan dewan komisaris akan menurunkan risiko dalam mengambil keputusan mengenai penggunaan laporan keuangan perusahaan sehingga dapat menurunkan biaya utang. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H1e: Komisaris Independen berpengaruh terhadap Biaya Utang

H2e: Kepemilikan Institusional memoderasi Komisaris Independen dengan Biaya Utang.